

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Anwar Makarim merencanakan berbagai langkah untuk memajukan dunia pendidikan Indonesia. Ia memulai sistem pendidikan yang disebut pembelajaran mandiri. Hal ini mengacu pada Visi Pendidikan Indonesia 2035 yang dirumuskan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (Kemendikbud), yaitu mengembangkan manusia Indonesia menjadi pembelajar sepanjang hayat, unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia. memajukan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila.

Sejalan dengan hal tersebut di atas Wacana pembinaan generasi baru yang melek sains, berhitung dan berkarakter di era globalisasi harus diadaptasi dengan pengembangan kerangka pendidikan yang membebaskan, relevan dan berkelanjutan. Proses pendidikan-pendidikan merupakan fenomena terbentuknya manusia seutuhnya sesuai dengan kodratnya, oleh karena itu diperlukan upaya konstruktif untuk mencapai tujuan tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) melakukan upaya mendasar dan progresif untuk mengubah kurikulum dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka. Tujuannya adalah untuk memperkuat peran kurikulum sekolah dalam proses transformasi pendidikan di masa sekarang dan masa depan.

Inti dari Kurikulum ini adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia dan menghasilkan generasi penerus yang memiliki karakter intelektual

yang kuat dan semangat belajar sepanjang hayat. Dalam ruang lingkupnya, isi program Merdeka mencakup keterampilan penerapan pembelajaran yang fleksibel dan karakter siswa Pancasila. Sementara itu, secara semangat satuan pendidikan, guru dan siswa mempunyai kebebasan untuk mengembangkan prosesnya. Satuan pendidikan juga didorong untuk berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan seperti industri, akademisi, praktisi, dan masyarakat untuk mewujudkan kebebasan belajar.

Rancangan sistem pendidikan ini mencakup berbagai strategi yang mencakup peran seluruh pelaku pendidikan untuk menjadi agen perubahan, mulai dari lembaga pendidikan, guru, siswa, keluarga, perusahaan atau industri, serta komunitas yang tergabung dalam teknologi pendidikan, organisasi tata kelola perusahaan dan lain-lain. Harapannya adalah terciptanya pendidikan berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Strategi yang disiapkan untuk mendukung gerakan merdeka belajar terdiri dari 10 kebijakan baru di bidang pendidikan, yang merupakan hasil pembaharuan dari sistem sebelumnya. 10 kebijakan ini masuk dalam Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035. 10 kebijakan pendidikan baru dari sistem pendidikan mandiri, adalah :

1) Menerapkan kolaborasi dan pembinaan antar sekolah (TK-SD-SMP -SMA, informal).

Kebijakan pertama pada sistem pendidikan Merdeka belajar yaitu menerapkan kolaborasi dan pembinaan antar sekolah. Sebelumnya, pemangku kepentingan bekerja dengan sistem mereka sendiri atau sistem yang tertutup. Sekolah-sekolah lebih fokus kepada administrasi dan peraturan yang terlalu membebani.

Penerapan kolaborasi dan pembinaan antar sekolah menjangkau berbagai tingkatan sekolah yaitu mulai dari TK, SD, SMP, SMA hingga sekolah informal. Ada 4 poin yang diwujudkan dalam kebijakan ini, yaitu adanya sekolah penggerak, program pembelajaran kebaya pengelolaan administrasi bersama, dan pendidikan informal yang berbasis nilai titik penerapan 4 poin ini akan mengubah sistem yang sebelumnya tertutup menjadi sistem terbuka dengan adanya kerjasama antar pemangku kepentingan.

2) Meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah

Peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah diwujudkan dengan memperbaiki sistem rekrutmen meningkatkan kualitas pelatihan, penilaian, serta mengembangkan komunitas/platform pembelajaran.

3) Membangun pendidikan nasional berbasis teknologi

Kebijakan pendidikan membangun platform pendidikan nasional berbasis teknologi titik platform yang dibangun Terdiri dari 5 kriteria: berpusat pada siswa, interdisipliner, relevan, berbasis proyek, dan kolaboratif. ketika platform tersebut sudah mulai digunakan sekolah juga akan didukung dengan sarana dan prasarana teknologi. Rencana dukungan tersebut mengenai tiga hal seperti biaya paket internet (*data cost*), ketersediaan perangkat belajar (*equipment availability*), dan konektivitas internet dan listrik untuk daerah 3T (*connectivity & electricity*).

4) Memperbaiki kurikulum nasional, pedagogi, dan penilaian

Perbaikan-perbaikan ini terdiri dari penyederhanaan konten materi, fokus pada literasi dan numerasi, pengembangan karakter, berbasis kompetensi, serta fleksibel. Luaran dari perbaikan kurikulum yaitu terbentuknya karakteristik pelajar Pancasila pada generasi masa depan. Pada pedagogi dan penilaian akan digunakan 3 sistem yaitu assessmen kompetensi minimum (AKM), Survei karakter, dan survei lingkungan belajar.

5) Meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan distribusi yang merata

Kebijakan meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk pendistribusian yang merata adalah nantinya pemerintah pusat akan bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui pendekatan yang bersifat personal dan konsultatif serta memberikan penghargaan berdasarkan prestasi. Pengawasan terkait anggaran, infrastruktur, penerimaan siswa (zonasi), dan guru, akan diawasi dengan pendistribusian yang merata di setiap daerah.

6) Membangun sekolah atau lingkungan belajar masa depan

Pembangunan ini mencakup 5 aspek yaitu aman dan inklusif, memanfaatkan teknologi, kolaboratif kreatif dan sistem belajar berbasis pengalaman. aman dan inklusif meliputi fasilitas darurat / tanggap bencana, bebas kerusakan, ramah disabilitas, dan bebas dari perundungan/diskriminasi. Pemanfaatan teknologi meliputi kelas digital dengan akses internet komputer untuk setiap anak, serta akses pembelajaran daring. Kolaboratif berarti kemudahan mengatur ruang kelas menjadi kelompok kelompok untuk membangun kerja tim, empati, dan kepemimpinan. aspek kreatif memungkinkan pengaturan ruang kelas sesuai kebutuhan/preferensi siswa atau guru untuk mengasah kreativitas sistem

pembelajaran berbasis pengalaman dilakukan melalui eksplorasi dengan lingkungan dan masyarakat untuk menyelesaikan masalah dunia nyata.

7) Memberikan insentif atas kontribusi dan kolaborasi pihak swasta di bidang Pendidikan

Pemberian insentif atas kontribusi dan kolaborasi pihak swasta di bidang pendidikan juga menjadi salah satu kebijakan pendidikan baru. pemberian insentif meliputi dana CSR, insentif pajak, kemitraan swasta publik otonomi, dan keuntungan yang lebih besar lainnya berupa insentif keuangan dan penyederhanaan regulasi titik penyederhanaan regulasi dilakukan karena persyaratan nirva dan kepemilikan Tanpa aset untuk Yayasan dan proses perizinan yang kompleks selama ini menjadi penghalang signifikan bagi sektor swasta atau Mitra Global untuk berpartisipasi dalam sistem pendidikan Indonesia.

8) Mendorong kepemilikan industri dan otonomi pendidikan vokasi

Pihak industri atau asosiasi akan terlibat dalam penyusunan kurikulum, mendorong pembelajaran dan pembiayaan pendidikan melalui sumbangan sektor swasta atau CSR. pada pendidikan vokasi, pemerintah pusat akan membentuk program magang dan Penempatan waktu dengan pemain industri titik pelatihan guru dan memperkerjakan praktisi industri juga menjadi rencana pada kebijakan ini. pemerintah akan mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan untuk menarik keterlibatan industri dan memungkinkan otonomi/fleksibilitas dan yang lebih besar.

9) Membentuk pendidikan tinggi kelas dunia

Kebijakan Pendidikan Baru ke-9 bertujuan untuk menciptakan pendidikan tinggi kelas dunia dengan mendiferensiasikan misi pendidikan tinggi sebagai center of excelent dan memperkuat hubungan industri dan kemitraan global. Ada 3 tujuan yang membedakan misi pendidikan tinggi: 1) membangun pendidikan tinggi yang bereputasi global di segala bidang sebagai pusat inovasi daya saing bangsa, 2) membangun pendidikan unggul di setiap provinsi sebagai mesin regional. dan pembangunan nasional. Pembangunan, 3) perluasan akses terhadap pendidikan tinggi dan pembentukan ekosistem pembelajaran sepanjang hayat.

10) Menyederhanakan mekanisme akreditasi dan memberikan otonomi yang lebih besar. Selama ini mekanisme akreditasi dinilai berbelit-belit karena adanya kewajiban pembaharuan akreditasi setiap 4 tahun sekali dan fokus pada aspek administrasi. Dalam kebijakan pendidikan baru ini, mekanisme akreditasi akan dilakukan secara otomatis dan berbasis data, menggabungkan standar pemerintah dan masyarakat untuk fokus pada hasil.

Dalam penelitian ini membahas tentang kebijakan (1) menerapkan kolaborasi dan pembinaan antar sekolah melalui program pembelajaran sebaya, (2) meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah dengan mengembangkan komunitas/platform pembelajaran dan (3) membangun peraturan pendidikan nasional berbasis teknologi.

Tujuan penerapan kurikulum merdeka adalah untuk menjawab berbagai permasalahan yang melekat pada kualitas manusia Indonesia dan problem pendidikan selama ini, secara spesifik juga dimaksudkan untuk mendorong agar

peserta didik dalam pembelajaran mampu berkembang sesuai dengan minat, bakat, potensi dan kebutuhan kodratnya peserta didik juga diberikan kelulusan untuk menjadi subjek dan bagian dari agen perubahan dalam proses pembelajaran.

Menurut Zulkipli dalam tesisnya (2003 : 17) menjelaskan bahwa di Dalam konteks berbangsa dan bernegara, kurikulum sekolah merupakan sarana pengajaran yang sangat strategis bagi penanaman dan pembentukan konsep dan perilaku individu yang berkaitan dengan kesadaran jati diri. Suryaman (2020:17) menambahkan bahwa pada kenyataannya kemampuan guru merupakan hal yang paling menentukan dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah, khususnya dalam pelaksanaan program Merdeka yang tergolong baru.

Implementasi kurikulum merdeka dalam kenyataannya sedikit banyaknya dipengaruhi oleh persepsi dan interpretasi yang dimiliki oleh pendidik. Menurut (Nurwiyatin, 484:2022). Tujuan Merdeka belajar ini adalah para guru, peserta Didik, dan orang tua bisa mendapatkan suasana yang menyenangkan titik dengan diterapkannya kurikulum Merdeka ini guru dan siswa dapat merdeka dalam berpikir, guru dapat berinovasi dalam penyampaian materi kepada peserta didik dan anak-anak juga dimudahkan dalam proses belajarnya dalam berinovasi dan kreativitas dalam belajar (Hutabarat, 2022: 15).

Dalam proses penerapan kurikulum Merdeka tidak semudah yang dibayangkan, banyak kendala dan tantangan yang perlu dielaborasi dan dipecahkan untuk tercapainya tujuan pendidikan nasional dalam kerangka kurikulum Merdeka. Tantangan dan kendala tersebut perlu disikapi dan direspon secara kritis dan komprehensif oleh para pemangku kepentingan. Tantangan atau kendala tersebut

misalnya berkaitan dengan kesiapan sumber daya manusia guru dan kemampuan guru dalam pemberdayaan fasilitas teknologi berbasis digital.

Dalam upaya menjawab tantangan dan kendala implementasi kurikulum merdeka dan percepatan implementasi kurikulum merdeka (selanjutnya di singkat IKM) di wilayah kabupaten Pasuruan. Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan melakukan banyak terobosan. Salah satu terobosannya adalah program percepatan ikm melalui optimalisasi peran musyawarah guru mata pelajaran (selanjutnya disingkat MGMP) yang tujuannya akhirnya adalah untuk meningkatkan kualitas guru di kabupaten Pasuruan.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi kurikulum Merdeka ini berpengaruh terhadap kualitas guru di SMP Negeri 2 Gempol dan SMP Negeri 1 Pandaan maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul OPTIMALISASI PERAN MGMP DALAM PERCEPATAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS GURU DI KABUPATEN PASURUAN (STUDI MULTI SITUS SMPN 2 GEMPOL DAN SMPN 1 PANDAAN).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, secara umum penilaian ini dan membahas tentang :

1. Bagaimana optimalisasi peran musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) dalam percepatan implementasi kurikulum Merdeka (IKM) di Kabupaten Pasuruan dapat meningkatkan kualitas guru?

2. Bagaimana bentuk optimalisasi peran musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) dalam percepatan implementasi kurikulum Merdeka (IKM) di Kabupaten Pasuruan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dipaparkan di atas maka tujuan penelitian adalah untuk:

1. Menjelaskan tentang optimalisasi peran musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) dalam percepatan implementasi kurikulum Merdeka (IKM) di Kabupaten Pasuruan dapat meningkatkan kualitas guru.
2. Menjelaskan tentang bentuk optimalisasi peran musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) dalam percepatan implementasi kurikulum Merdeka (IKM) di Kabupaten Pasuruan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu manajemen pendidikan bagi penyusun khususnya dan dunia pendidikan pada umumnya.

2. Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat sebagai media untuk memperkaya wawasan keilmuan dalam dunia Pendidikan.
- b. Bagi sekolah, penelitian dapat memberikan gambaran tentang kualitas guru.

- c. Bagi Dinas Pendidikan, penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang optimalisasi peran MGMP dalam percepatan IKM dan peningkatan kualitas guru di Kabupaten Pasuruan.
- d. Bagi peneliti lain bermanfaat sebagai bahan pembandingan bagi penderitaan penelitian berikutnya yang sejenis.

1.5 Definisi Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini dan untuk memperoleh pandangan yang sejalan, terlebih dahulu penulis akan menguraikan secara singkat pengertian-pengertian istilah yang terdapat dalam judul tersebut:

1. Optimalisasi berasal dari kata optimal artinya terbaik atau tertinggi. mengoptimalkan berarti menjadikan paling baik atau paling tinggi, sedangkan optimalisasi adalah proses mengoptimalkan sesuatu, dengan kata lain proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik atau paling tinggi. Jadi optimalisasi di penelitian ini mempunyai arti berusaha secara optimal untuk hasil yang terbaik untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan.
2. MGMP atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran adalah forum atau wadah yang memfasilitasi berkumpulnya guru mata pelajaran yang sama untuk mengembangkan profesionalitas kerja. MGMP yang dimaksud dalam penelitian ini adalah MGMP yang ada di Kabupaten Pasuruan yang meliputi MGMP muatan lokal bahasa daerah, MGMP bahasa Indonesia, MGMP IPS, dan MGMP bahasa Inggris.

3. Percepatan adalah perbuatan hal dan sebagainya mempercepat sesuatu titik
Dalam penelitian ini adalah mempercepat proses implementasi kurikulum Merdeka.
4. IKM (Implementasi Kurikulum Merdeka), implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan terhadap sesuatu titik sedangkan ikan adalah upaya untuk memulihkan pembelajaran demi mewujudkan transformasi pendidikan di Indonesia ke arah yang lebih baik. Dalam penelitian ini implementasi kurikulum merdeka adalah pelaksanaan atau penerapan terhadap kurikulum Merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang diluncurkan oleh kemendikbudristek. Kurikulum merdeka adalah metode pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat. Para pelajar dapat memilih pelajaran apa saja yang ingin dipelajari sesuai passion yang dimilikinya. Secara umum kurikulum merdeka merupakan kurikulum pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik mempunyai waktu yang cukup untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Nantinya, guru memiliki kekuasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran bisa disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik.
5. Kualitas guru adalah berhubungan dengan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan pengembangan diri profesional.

